

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kain Tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau

Yeza Azwar^{1*}, Wa Ode Arsyiah¹, La Ode Dwiyan Pramono Darmin¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: yezaazwar92@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 29 November 2025

Revised: 23 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kain Tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau yang dikenal sebagai sentra utama pengrajin kain tenun khas Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan dari pihak Pemerintah Daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian yaitu peran pemerintah sebagai dinamisor, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Baubau telah menunjukkan perannya sebagai dinamisor melalui pelatihan dan penyuluhan, namun masih terbatas. Peran sebagai fasilitator belum optimal, terutama dalam pemberian bantuan modal dan fasilitasi ketersediaan bahan baku. Sementara itu, peran sebagai katalisator dalam mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kain tenun masih dilakukan secara insidental, seperti pada kegiatan pameran. Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kain tenun di Kelurahan Sulaa belum maksimal. Diperlukan upaya yang lebih strategis dan berkelanjutan agar produk tenun Sulaa dapat menjadi komoditas unggulan lokal yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kain Tenun

Abstract

This study aims to describe the Role of Local Governments in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises of Woven Fabrics in Sulaa Village, Betoambari District, Baubau City, which is known as the main center of Buton woven fabric craftsmen. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation of informants from the Regional Government. Data analysis techniques are carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The focus of the research is the role of the government as a dynamizer, facilitator, and catalyst. The results of the study show that the Baubau City Regional Government has shown its role as a dynamizer through training and counseling, but it is still limited. The role as a facilitator has not been optimal, especially in providing capital assistance and facilitating the availability of raw materials. Meanwhile, the role of a catalyst in promoting Micro, Small and Medium Enterprises products of woven fabrics is still carried out incidentally, such as in exhibition activities. Thus, the role of the Regional Government in the development of Micro, Small and Medium Enterprises of woven fabrics in Sulaa Village has not been maximized. More strategic and sustainable efforts are needed so that Sulaa weaving products can become local superior commodities that are able to compete nationally and internationally.

Keywords: Role of Local Government, Micro, Small, and Medium Enterprises, Woven Fabric

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pasal 18A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang luas untuk mengelola potensi wilayahnya secara mandiri (Sari et al., 2024, p.41).

Dalam bidang ekonomi, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan dukungan aktif dari pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi pemasaran produk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut adalah melalui pengembangan UMKM sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan bantuan modal, pelatihan dan pendampingan, memfasilitasi akses pasar, serta menciptakan regulasi yang melindungi pelaku UMKM dari persaingan yang tidak sehat (Salam, 2022).

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, antara lain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta sarana pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UMKM juga dikenal sebagai sumber inovasi dan kreativitas karena fleksibilitasnya dalam merespons perubahan pasar. (Qadisyah et al., 2023) menyatakan bahwa keberadaan UMKM mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sektor ekonomi formal.

Salah satu bentuk UMKM yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya adalah usaha kerajinan kain tenun tradisional. Kain tenun merupakan hasil budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, kepercayaan, serta struktur sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki karakteristik kain tenun yang berbeda, baik dari segi motif, warna, maupun teknik pembuatannya. (Nuraini & Miftahul, 2022) menjelaskan bahwa seni tenun merupakan representasi identitas budaya masyarakat lokal yang perlu dilestarikan melalui dukungan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Baubau, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kain tenun tradisional khas Buton. Kelurahan Sulaa di Kecamatan Betoambari merupakan sentra utama pengrajin kain tenun Buton yang hingga saat ini masih mempertahankan teknik produksi tradisional menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Teknik ini menghasilkan kain dengan kualitas tinggi dan keunikan tersendiri, sehingga memiliki nilai jual yang relatif tinggi. Namun demikian, keberlangsungan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keterbatasan bahan baku benang khusus yang harus didatangkan dari luar daerah, lemahnya sistem pemasaran, serta rendahnya minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi bertenun (Hisyam, 2020).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung promosi dan pemasaran kain tenun Sulaa. Pemasaran produk tenun masih dilakukan secara terbatas dan bersifat insidental, misalnya hanya pada saat pameran tertentu. Kondisi ini menyebabkan produk tenun Kelurahan Sulaa belum sepenuhnya mendapatkan prioritas sebagai komoditas unggulan daerah, meskipun wilayah ini dikenal sebagai penghasil tenun Buton terbesar di Kota Baubau (Oyisultra.com, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan usaha kerajinan tenun. (Agriyena, 2021) menemukan bahwa keberhasilan pengembangan usaha tenun sangat dipengaruhi oleh konsistensi peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, terutama dalam hal pelatihan, pembinaan

kelembagaan, dan promosi produk. Namun, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa peran pemerintah sering kali belum berjalan optimal dan masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan alternatif solusi berupa penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM kain tenun, baik melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan, penyediaan fasilitas dan akses permodalan, maupun penguatan promosi dan pemasaran produk. Dari berbagai alternatif solusi tersebut, penelitian ini memilih untuk menggunakan perspektif teori Ryaas Rasyid yang memandang peran pemerintah daerah melalui tiga dimensi, yaitu sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator (Safitri & Rusdin, 2024). Pendekatan ini dipandang relevan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk dan tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kain tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Administrasi Negara serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran merupakan konsep penting dalam kajian Ilmu Administrasi Negara karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan suatu aktor atau institusi dalam sistem pemerintahan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status, yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki seseorang atau lembaga dalam masyarakat (Raintung et al., 2021). Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai posisi formal, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diharapkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Syamsir Torang menyebutkan bahwa peran merupakan tugas atau kewajiban seseorang atau lembaga dalam menjalankan suatu usaha atau pekerjaan tertentu. Peran mencerminkan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial terhadap individu atau organisasi yang memiliki kedudukan tertentu (Awaludin & Ramdani, 2022). Perbedaan antara peran yang diharapkan dan peran yang dijalankan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan peran suatu institusi, termasuk pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan, konsep peran tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemerintah itu sendiri. Pemerintah dipahami sebagai struktur politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, dan melayani masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Apter mendefinisikan pemerintah sebagai sekumpulan individu yang diberi tanggung jawab untuk mempertahankan dan menyesuaikan sistem sosial serta membuat keputusan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan (Makalew et al., 2021). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki fungsi strategis dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi karena pemerintah daerah lebih memahami potensi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat di wilayahnya. (Lepa et al., 2019) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki.

Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pembangunan dapat diwujudkan melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator (Safitri & Rusdin, 2024). Sebagai dinamisator, pemerintah daerah berperan memberikan dorongan, bimbingan, dan motivasi kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi. Peran ini biasanya diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat.

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah bertugas menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan akses terhadap sumber daya, termasuk permodalan dan bahan baku. Pemerintah daerah juga berperan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat agar proses pembangunan berjalan secara

optimal. Dalam konteks UMKM, peran fasilitator sangat penting untuk mengatasi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar yang sering dihadapi pelaku usaha kecil (Maharani et al., 2023).

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator diwujudkan melalui upaya mempercepat proses pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai agen yang mendorong percepatan pertumbuhan UMKM melalui promosi, perluasan jaringan pemasaran, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Menurut Rasyid, peran katalisator memungkinkan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional (Safitri & Rusdin, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. UMKM berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, penggerak ekonomi lokal, serta sarana pemberdayaan masyarakat. (Qadisyah et al., 2023) menyatakan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, sehingga mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks budaya lokal, UMKM kain tenun merupakan bentuk usaha yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Kain tenun merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan identitas masyarakat setempat. (Nuraini & Miftahul, 2022) menjelaskan bahwa keberlangsungan usaha tenun tradisional sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sosial dan kebijakan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan persaingan pasar.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan usaha kerajinan tenun dan UMKM. Penelitian (Agriyena, 2021) menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran signifikan sebagai fasilitator dan katalisator dalam pengembangan usaha tenun melalui pelatihan, promosi, dan pembinaan kelembagaan. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada analisis komprehensif terhadap peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan perspektif teori yang berbeda dan belum menekankan aspek dinamisator secara mendalam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Nurzanah et al., 2021) menemukan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah apabila dijalankan secara konsisten. Kelemahan penelitian ini terletak pada cakupan objek penelitian yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji UMKM berbasis budaya lokal seperti kain tenun tradisional.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM telah banyak dikaji, namun masih terdapat celah penelitian terkait analisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM kain tenun dengan menggunakan pendekatan teori Ryaas Rasyid. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian terdahulu dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kain tenun di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau pengukuran kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Desain deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan kontekstual, khususnya terkait peran pemerintah sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pembangunan ekonomi lokal. Penelitian kualitatif juga relevan digunakan ketika fokus kajian terletak pada proses, interaksi, serta konteks sosial yang melingkupi suatu kebijakan atau program (Moleong, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana peran tersebut dijalankan dalam realitas lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang dikenal sebagai sentra utama pengrajin kain tenun khas Buton. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki serta

tantangan pengembangan UMKM yang masih dihadapi masyarakat setempat. Penelitian lapangan dilakukan melalui tahapan observasi awal, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Penetapan lokasi berbasis potensi lokal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya konteks dalam memahami fenomena sosial (Yin, 2018).

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan UMKM kain tenun. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah daerah yang membidangi UMKM dan ekonomi kreatif, pemerintah kelurahan, serta pelaku UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa. Teknik purposive sampling digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dari sumber yang kompeten (Patton, 2015). Pemilihan informan yang tepat menjadi kunci dalam menghasilkan data yang kredibel dan kaya makna.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan serta menyusun pedoman wawancara dan observasi. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan aktif dalam menginterpretasikan data (Creswell & Poth, 2018). Oleh karena itu, kepekaan peneliti terhadap konteks sosial dan interaksi di lapangan menjadi bagian penting dalam proses penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas UMKM kain tenun serta bentuk keterlibatan pemerintah daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, regulasi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan bentuk triangulasi yang bertujuan meningkatkan validitas dan keabsahan data (Miles et al., 2014). Dengan triangulasi, peneliti dapat membandingkan berbagai sumber data untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Model analisis ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antar fenomena secara lebih mendalam dan reflektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kain tenun di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan tiga peran pemerintah daerah, yaitu sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator diwujudkan melalui upaya mendorong dan memotivasi pelaku UMKM kain tenun agar tetap mempertahankan dan mengembangkan usaha tenun tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan pengrajin kain tenun, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan berupa sosialisasi dan pelatihan keterampilan menenun serta pengenalan motif tenun khas Buton. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta menumbuhkan kesadaran pengrajin akan pentingnya pelestarian kain tenun sebagai warisan budaya lokal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai dinamisator belum berjalan secara optimal. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan masih bersifat tidak rutin dan belum menjangkau seluruh pengrajin kain tenun di Kelurahan Sulaa. Selain itu, rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan menenun menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memotivasi regenerasi pengrajin masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pemerintah sebagai pendorong dinamika sosial dan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Temuan ini sejalan dengan teori Ryaas Rasyid yang menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator menuntut adanya keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Safitri & Rusdin, 2024). Ketidakkonsistenan kegiatan pembinaan menyebabkan dorongan yang diberikan pemerintah belum mampu menciptakan dinamika pengembangan UMKM kain tenun secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh konsistensi dukungan kelembagaan dan pembinaan berkelanjutan. Studi (Tambunan, 2019) menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia cenderung mengalami stagnasi ketika intervensi pemerintah bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan strategi jangka panjang. Demikian pula, penelitian (Ismail et al., 2022) menegaskan bahwa keberlanjutan UMKM berbasis ekonomi kreatif sangat bergantung pada kesinambungan program pelatihan, akses pasar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, ketidakkonsistenan pembinaan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi faktor penghambat terbentuknya ekosistem usaha yang resilien.

Secara lebih luas, temuan ini juga selaras dengan perspektif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan pentingnya interaksi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan lokal (Ansell & Gash, 2008). Ketika intensitas interaksi menurun, partisipasi masyarakat pun cenderung melemah, sehingga proses pemberdayaan tidak mencapai hasil optimal. Dalam konteks tenun Sulaa, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga penguatan motivasi, ruang partisipasi, serta kepastian keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi humanis dalam Pembangunan yakni membangun rasa memiliki, kebanggaan budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam peran dinamisator.

Dapat ditegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada kesinambungan dan konsistensi implementasinya. Peran dinamisator yang efektif mensyaratkan komitmen jangka panjang, evaluasi berkala, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda sebagai penerus tradisi menenun. Jika konsistensi tersebut dapat diperkuat, maka dinamika pengembangan UMKM kain tenun tidak hanya bersifat administratif, tetapi tumbuh sebagai gerakan sosial dan ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator tercermin melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta kemudahan akses bagi pelaku UMKM kain tenun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa peralatan tenun dan memfasilitasi pengrajin dalam memperoleh informasi terkait program bantuan UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku UMKM kain tenun.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan peran fasilitator. Bantuan yang diberikan belum merata dan masih terbatas pada kelompok pengrajin tertentu. Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi pengrajin, yaitu keterbatasan bahan baku benang yang harus didatangkan dari luar daerah, belum sepenuhnya teratasi melalui fasilitasi pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi dan ketidakstabilan proses produksi kain tenun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil pengrajin kain tenun. Padahal, menurut Ryaas Rasyid, pemerintah daerah sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan fasilitas dan akses sumber daya yang memadai (Safitri & Rusdin, 2024). Keterbatasan fasilitasi ini menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tambunan, 2019) yang menyatakan bahwa hambatan utama UMKM di Indonesia bukan semata pada keterbatasan produksi, melainkan pada akses pembiayaan, teknologi, dan jaringan pasar yang belum merata. Ketika fasilitasi pemerintah tidak terintegrasi dan berkelanjutan, UMKM cenderung sulit meningkatkan skala usaha maupun daya saingnya. Selain itu, studi (Beck & Demircuc-Kunt, 2006) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal menjadi faktor struktural yang menghambat pertumbuhan UMKM di berbagai negara berkembang. Dalam konteks tenun Sulaa, keterbatasan fasilitasi memperlihatkan bahwa dukungan yang ada belum

sepenuhnya menjawab tantangan produksi, inovasi, dan pemasaran yang dihadapi para pengrajin.

Lebih lanjut, perspektif pemberdayaan ekonomi lokal menekankan bahwa peran fasilitator yang efektif harus berbasis kebutuhan (needs-based approach) dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan program (Kabeer, 1999). Ketika fasilitasi belum menyentuh kebutuhan substantif yaitu stabilitas bahan baku, keberlanjutan pelatihan desain, atau akses digital marketing, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pengrajin tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang pasar yang lebih luas. Dengan demikian, peran fasilitator idealnya diarahkan pada penguatan kapasitas jangka panjang, bukan sekadar distribusi bantuan.

Secara keseluruhan, keterbatasan fasilitasi menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa. Namun demikian, kondisi ini juga membuka ruang evaluasi kebijakan agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha. Pendekatan fasilitatif yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal akan lebih efektif dalam mendorong UMKM tenun tumbuh sebagai kekuatan ekonomi sekaligus penjaga identitas budaya daerah.

Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM kain tenun diwujudkan melalui upaya percepatan promosi dan pemasaran produk tenun khas Buton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengikutsertakan produk kain tenun Kelurahan Sulaa dalam beberapa kegiatan pameran dan event daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kain tenun Buton kepada masyarakat luas serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

Namun, kegiatan promosi tersebut masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Pemasaran kain tenun sebagian besar masih dilakukan secara tradisional dan bergantung pada pesanan lokal, sehingga jangkauan pasar produk tenun relatif terbatas. Pemerintah daerah belum secara maksimal memanfaatkan media digital dan jaringan pemasaran yang lebih luas untuk mempercepat perkembangan UMKM kain tenun.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator belum berjalan optimal. Menurut teori Ryaas Rasyid, peran katalisator menuntut pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan dengan mendorong terciptanya inovasi dan perluasan jaringan pemasaran (Safitri & Rusdin, 2024). Kurangnya intensitas promosi dan inovasi pemasaran menyebabkan percepatan pengembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa belum tercapai secara maksimal.

Temuan tersebut sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya inovasi dan akses pasar dalam meningkatkan daya saing UMKM. (Porter, 1990) menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu produk sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan diferensiasi dan memperluas jaringan pasar. Tanpa dukungan promosi yang konsisten dan strategi pemasaran yang adaptif, produk lokal cenderung terjebak pada pasar terbatas dan sulit berkembang. Selain itu, bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong transformasi UMKM melalui fasilitasi digitalisasi, promosi ekspor, dan penguatan ekosistem inovasi. Dengan demikian, kurangnya intensitas promosi dalam kasus tenun Sulaa berimplikasi langsung pada lambatnya peningkatan nilai tambah produk.

Lebih lanjut, studi terbaru menunjukkan bahwa akselerasi UMKM berbasis ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh integrasi antara inovasi produk dan strategi pemasaran digital (Nambisan et al., 2019). Dalam era ekonomi digital, promosi tidak lagi terbatas pada pameran konvensional, tetapi juga mencakup pemanfaatan platform daring, branding berbasis cerita budaya, serta kolaborasi lintas sektor. Bagi pengrajin tenun Sulaa, promosi yang kuat bukan hanya soal peningkatan penjualan, tetapi juga pengakuan terhadap identitas budaya lokal yang melekat pada setiap produk. Oleh karena itu, peran katalisator yang humanis harus mampu menjembatani antara nilai budaya dan tuntutan pasar modern.

Secara keseluruhan, keterbatasan peran katalisator dalam penelitian ini menegaskan perlunya strategi akselerasi yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas promosi, memperluas kemitraan strategis, serta mendorong inovasi desain dan pemasaran berbasis digital. Dengan penguatan tersebut, UMKM kain tenun tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga tumbuh sebagai sektor ekonomi kreatif yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Sebagai dinamisator, pemerintah Kelurahan Sulaa Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Baubau menjalankan peran strategis sebagai dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM kain tenun di Kelurahan Sulaa. Sebagai dinamisator, pemerintah aktif membangun kesadaran kolektif dan regenerasi penenun melalui pelatihan, pendampingan, serta pendekatan kepada generasi muda guna menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal. Sebagai fasilitator, dukungan diberikan dalam bentuk bantuan sarana produksi dan pendampingan administratif melalui koordinasi lintas dinas, meskipun masih diperlukan penyederhanaan mekanisme agar akses lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah memperluas akses pasar melalui promosi, pameran, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis, sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tenun. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif tiga peran pemerintah dalam konteks ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, regenerasi sosial, dan penguatan jejaring pasar secara simultan. Dengan demikian, keberlanjutan usaha tenun memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal sebagai fondasi pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyena. (2021). Peran Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengembangan potensi usaha kerajinan tenun dan songket di Kampung Tenun Balai Panjang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 130–142.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Awaludin, A., & Ramdani, R. (2022). Peran organisasi pemerintah dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 60–72.
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking and Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hisyam, M. N. (2020). Pengembangan industri kain tenun Buton berbasis budaya lokal. *Jurnal Industri Kreatif*, 4(2), 80–92.
- Ismail, T., Soetanto, D., & Jack, S. (2022). Government support and SME performance: The mediating role of innovation and resilience. *Journal of Small Business Management*, 60(3), 621–645. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1717296>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30, 435–464. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145800315>
- Lepa, Y., Soares, A., & Da Costa, J. (2019). Perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 70–82.
- Maharani, D., Putri, A., & Setiawan, R. (2023). Peran pemerintah sebagai fasilitator UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 95–108.
- Makalew, M. N., Rantung, T., & Londa, V. (2021). Konsep dan fungsi pemerintahan dalam sistem administrasi negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 25–37.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>
- Nuraini, & Miftahul. (2022). Kain tenun sebagai identitas budaya dan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Antropologi Budaya*, 11(2), 115–125.

- Nurzanah, E., Putri, S., & Lestari, D. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 85–96.
- Oyisultra.com. (2023). *Kampung Tenun Sulaa sebagai sentra tenun khas Buton*. <https://oyisultra.com>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Qadisyah, N., Rahman, F., & Amin, S. (2023). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 58–68.
- Raintung, M., Soekanto, S., & Londa, V. (2021). Konsep peran dalam kajian sosiologi administrasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(1), 50–60.
- Safitri, R., & Rusdin. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 88–99.
- Salam, M. D. (2022). Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 55–65.
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.